

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

**PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN
Elektronik**

**: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
Program : Pelayanan Penanaman Modal Kegiatan : Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Tujuan : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik	- Luas Wilayah Kabupaten Solok Selatan 3.346,20 Km2 - Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Selatan 182.936 Jiwa : Laki-laki 93.227 Jiwa dan Perempuan 89.709 Jiwa	Akses : Sebagai lembaga yang mengeluarkan seluruh perizinan dan non perizinan, masih dilemunya kendala seperti cukup jauhnya jarak tempat masyarakat yang akan melakukan proses izin usahanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	1. Sebagian besar Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan belum mengetahui perspektif gender, sebab isu dianggap sebagai isu penting yang perlu diangani secara serius 2. Kurangnya Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan	1. Persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat maupun pelaku usaha dalam mendapatkan dokumen yang dibutuhkan 2. Belum memedainya sarana transportasi umum bagi masyarakat dalam mengurus dokumen perizinan dan non perizinan maupun dokumen pribadinya 3. Masih kurangnya koordinasi antar OPD dengan instansi vertikal daerah 4. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin perizinan dan non perizinan	1. Terwujudnya pelayanan terpadu perizinan dan non perizinan dengan berbasis Sistem pelayanan perizinan berusaha yang terintegrasi secara elektronik yang memadai baik untuk laki-laki maupun perempuan secara proposional 2. Tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi untuk berkunjng 3. Tersedianya layanan aplikasi secara online dalam mengurus izin untuk berinvestasi	1. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengurusan izin secara gratis 2. Penyebarluasan promosi melalui media elektronik 3. Layanan melalui kecamatan-kecamatan secara gratis	- Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Selatan 182.936 Jiwa : Laki-laki 93.227 Jiwa dan Perempuan 89.709 Jiwa Sub Kegiatan : Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik	Tersedianya Anggaran sebesar : Rp. 50.000.000,- Output : -Frekuensi kunjungan perizinan keliling
		Partisipasi : Rumusan kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal belum didasar Analisis (termasuk analisis Gender)						Outcome : Terbunya dokumen perizinan dan non perizinan
		Kontrol : Studi aspek social (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, termasuk isu gender) masih kurang diperhatikan dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang						

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base- Line)	Indikator Gender
		Manfaat : Belum semua masyarakat bisa datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengurus izin pelayanan perizinan						

**TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

1. BAPPEDA
2. DP2KB
3. INSPEKTORAT
4. BPKD




GENDER BUDGET STATEMENT / GBS (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

PERANGKAT DAERAH SUB KEGIATAN

: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
: Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik

Program	Pelayanan Penanaman Modal
Kegiatan	Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Frekuensi kunjungan perizinan keiling
Tujuan Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Analisa Situasi	<p>Akses : Sebagai lembaga yang mengeluarkan seluruh perizinan dan non perizinan, masih ditemuinya kendala seperti cukup jauhnya jarak tempuh masyarakat yang akan melakukan proses izin usahanya ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</p> <p>Partisipasi : Rumusan kegiatan pada Program Pelayanan Penanaman Modal belum didasari Analisis (termasuk analisis Gender)</p> <p>Kontrol : Studi aspek social (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, termasuk isu gender) masih kurang diperhatikan dalam penyediaan sarana dan prasarana penunjang pelayanan perizinan</p> <p>Manfaat : Belum semua masyarakat bisa datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengurus izin</p> <p>Sebagian besar Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan belum mengetahui perspektif gender, sebab isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu diangani secara serius</p>

	<p>Kurangnya Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan</p> <p>Persyaratan yang harus dipenuhi masyarakat maupun pelaku usaha dalam mendapatkan dokumen yang dibutuhkannya</p> <p>Belum memadainya sarana transportasi umum bagi masyarakat dalam mengurus dokumen perizinan dan non perizinan maupun dokumen pribadinya</p> <p>Masih kurangnya koordinasi antar OPD dengan instansi vertical daerah</p> <p>Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin perizinan dan non perizinan</p>	
Rencana Aksi	Komponen 1	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengurusan izin secara gratis
	Komponen 2	Penyebarluasan promosi melalui media elektronik
	Komponen 3	Layanan melalui kecamatan-kecamatan secara gratis
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 50.000.000,-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Terbitnya dokumen perizinan dan non perizinan	


PENGUNA ANGGARAN,
YOLLY HIRLANDES PUTRA, ST, MIL
 Nip. 19811215 200604 1 006

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

**PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN**

**: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN	PENGUKURAN HASIL	Langkah 8	Langkah 9
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal				
Program : Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Unsur Pemerintahan Daerah	- Luas Wilayah Kabupaten Solok Selatan 3.346,20 Km ² - Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Selatan 182.936 Jiwa : Laki-laki 93.227 Jiwa dan Perempuan 89.709 Jiwa - Banyaknya masyarakat perempuan yang datang mengurus izin ke DPMPTSP - Belum tercukupinya kebutuhan atas hak-hak perempuan dan disabilitas - Perluanya ketersediaan sarana dan prasarana bagi pemenuhan kebutuhan perempuan dan disabilitas	Akses : Sebagai lembaga yang mengeluarkan seluruh perizinan dan non perizinan, masih ditemuinya kendala seperti sarana dan prasarana gedung kantor yang belum mencukupi untuk kebutuhan perempuan dan disabilitas	1. Sebagian besar Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan belum mengetahui perspektif gender, sebab itu isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu dilangani secara serius 2. Belum cukuanya ketersediaan sarana dan prasarana perempuan dan disabilitas 3. Keterbatasan dukungan anggaran untuk memprioritaskan kebutuhan perempuan dan disabilitas dalam design gedung kantor	Belum adanya aturan yang menekankan pentingnya pemenuhan kebutuhan perempuan dan disabilitas dalam hal sarana dan prasarana gedung kantor	Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana serta kenyamanan pegawai dan masyarakat dalam pelayanan.	1. Menyediakan ruang menyusui beserta kelengkapan yang dibutuhkan 2. Menyediakan ruang bermain anak beserta kelengkapan yang dibutuhkan 3. Menyediakan jalur khusus disabilitas kamar mandiwc khusus disabilitas	- Jumlah Penduduk Kabupaten Solok Selatan 182.936 Jiwa : Laki-laki 93.227 Jiwa dan Perempuan 89.709 Jiwa	Tersedianya Anggaran sebesar : Rp. 3.000.000.000,- Sub Kegiatan : Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Input : Rp. 3.000.000.000,- Output : -Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan Outcome : Persentase barang milik daerah yang tersedia

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kebijakan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawasan	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN		PENGUKURAN HASIL	
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal	Reformulasi Tujuan	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
		Manfaat : Tidak semua sarana dan prasarana untuk perempuan dan disabilitas ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengurus izin						

**TIM PERENCANAAN PENGANGGARAN RESPONSIF GENDER
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023**

1. BAPPEDA
2. DP2KB
3. INSPEKTORAT
4. BPKD


 (.....)
 Muhammad


 (.....)
 Shanti

GENDER BUDGET STATEMENT / GBS (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

**PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN**

**: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
: Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya**

Program	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
Kegiatan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Sub Kegiatan	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan
Tujuan Kegiatan	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik
Analisa Situasi	<p>Akses : Sebagai lembaga yang mengeluarkan seluruh perizinan dan non perizinan, masih ditemuinya kendala seperti sarana dan prasarana gedung kantor yang belum mencukupi untuk kebutuhan perempuan dan disabilitas</p> <p>Partisipasi : Rumusan kegiatan pada Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota didasari Analisis (termasuk analisis Gender)</p> <p>Kontrol : Studi aspek social (identifikasi kebutuhan dan aspirasi masyarakat, termasuk isu gender) masih kurang diperhatikan dalam penyediaan sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya dalam pelayanan perizinan</p> <p>Manfaat : Tidak semua sarana dan prasarana untuk perempuan dan disabilitas ada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengurus izin</p> <p>Sebagian besar Sumber Daya Manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Solok Selatan belum mengetahui perspektif gender, sebab itu isu gender belum dianggap sebagai isu penting yang perlu ditangani secara serius</p>

	Belum cukupnya ketersediaan kebutuhan sarana dan prasarana pemenuhan dan disabilitas Keterbatasan dukungan anggaran untuk memprioritaskan kebutuhan pemenuhan dan disabilitas dalam design gedung kantor	
Rencana Aksi	Komponen 1	Menyediakan ruang menyusui beserta kelengkapan yang dibutuhkan
	Komponen 2	Menyediakan ruang bermain anak beserta kelengkapan yang dibutuhkan
	Komponen 3	Menyediakan jalur khusus disabilitas dan kamar mandi/wc khusus disabilitas
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 3.000.000.000,-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Persentase barang milik daerah yang tersedia	



PENGUNA ANGGARAN,

YOLLY HIRLANDES PUTRA, ST, MIL

 Nip. 19811215 200604 1 006

GENDER ANALYSIS PATHWAY (GAP)

PERANGKAT DAERAH : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

Langkah 1	Langkah 2	Langkah 3	Langkah 4	Langkah 5	Langkah 6	Langkah 7	Langkah 8	Langkah 9
Nama Kegiatan/Program/ Kegiatan	Data Pembuka Wawancara	ISU GENDER			KEBIJAKAN DAN RENCANA KEDEPAN	Rencana Aksi	Data Dasar (Base-Line)	Indikator Gender
		Faktor Kesenjangan	Sebab Kesenjangan Internal	Sebab Kesenjangan Eksternal				
Program : Promosi Penanaman Modal Kegiatan : Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Tujuan : Meningkatkan Investasi	- Jumlah Investor masih sedikit yang berinvestasi - Jumlah promosi investasi dilakukan melalui media dan pameran dalam dan luar daerah - Jumlah peminat pengurus izin perempuan lebih banyak dari laki-laki	Akses : Pembebasan lahan yang terkendala Partisipasi : Masyarakat belum menerima secara terbuka terhadap investor yang mau berinvestasi	1. Ketersediaan anggaran yang belum mencukupi 2. SDM pengelola belum maksimal untuk menarik investor berinvestasi 3. Kurangnya sosialisasi perizinan dan non perizinan	1. Kurangnya minat investor dalam berinvestasi 2. Lambatnya realisasi investasi 3. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin perizinan dan non perizinan 4. Sulitnya pembebasan lahan dari masyarakat	1. Meningkatkan investasi dari investor 2. Tingkat kunjungan masyarakat yang tinggi untuk berkinjng 3. Memberikan pelayanan yang mudah untuk investor dalam berinvestasi 4. Tersedianya jaringan Aplikasi secara online dalam mengurus izin untuk berinvestasi	1. Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengurusan izin secara gratis 2. Penyebarluasan promosi melalui media elektronik 3. Layanan melalui kecamatan-kecamatan secara gratis	- Jumlah peminat pengurus izin perempuan lebih banyak dari laki-laki	Tersedianya Anggaran sebesar : Rp. 50.000.000,- Sub Kegiatan : Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota Input : Rp. 50.000.000,- Output : -Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota Outcome : Peningkatan penyelenggaraan promosi Penanaman Modal

TIM PERENCANAAN PENGANGARAN RESPONSIF GENDER
KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023

1. BAPPEDA
2. DP2KB
3. INSPEKTORAT
4. BPKD

(.....)

(.....)

(.....)

(.....)

GENDER BUDGET STATEMENT / GBS (PERNYATAAN ANGGARAN GENDER)

**PERANGKAT DAERAH
SUB KEGIATAN**

**: DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
: Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota**

Program	Promosi Penanaman Modal
Kegiatan	Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
Sub Kegiatan	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota
Indikator Kinerja Sub Kegiatan	Jumlah dokumen hasil kegiatan promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota
Tujuan Kegiatan	Meningkatnya Investasi
Analisa Situasi	<p>Akses : Pembebasan lahan yang terkendala</p> <p>Partisipasi : Masyarakat belum menerima secara terbuka terhadap investor yang mau berinvestasi</p> <p>Kontrol : Sarana dan prasarana yang belum mencukupi</p> <p>Mamfaat : Belum semua investor bisa datang ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk mengurus izin</p> <p>Ketersediaan anggaran yang belum mencukupi</p> <p>SDM pengelola belum maksimal untuk menarik investor berinvestasi</p> <p>Kurangnya sosialisasi perizinan dan non perizinan</p>

	Kurangnya minat investor dalam berinvestasi Lambatnya realisasi investasi Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengurus izin perizinan dan non perizinan Sulitnya pembebasan lahan dari masyarakatKurangnya Sosialisasi Perizinan dan Non Perizinan	
Rencana Aksi	Komponen 1	Kegiatan sosialisasi kepada masyarakat untuk pengurusan izin secara gratis
	Komponen 2	Penyebarluasan promosi melalui media elektronik
	Komponen 3	Layanan melalui kecamatan-kecamatan secara gratis
Alokasi Anggaran Output Kegiatan	Rp. 50.000.000,-	
Dampak/Hasil Output Kegiatan	Persentase penyelenggaraan promosi Penanaman Modal	


PENGUNA ANGGARAN,
YOLLY HIRLANDES PUTRA, ST, MIL
NIP. 19811215 200604 1 006